

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Pada April 2025 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Provinsi Banten sebesar 1,59 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 108,29. Tertinggi di Kabupaten Lebak sebesar 1,85 persen dengan IHK sebesar 108,44. Inflasi y-on-y terjadi karena naiknya harga pada 10 kelompok pengeluaran yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,27 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,03 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,61 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,60 persen; kelompok kesehatan sebesar 1,92 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,16 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 4,24 persen; kelompok pendidikan sebesar 1,25 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,01 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 8,90 persen. Sementara itu satu kelompok mengalami deflasi, yaitu kelompok transportasi sebesar 0,12 persen.

Tingkat inflasi month to month (m-to-m) Provinsi Banten bulan April 2025 sebesar 1,29 persen dan tingkat inflasi year to date (y-to-d) sebesar 1,58 persen.

Pada Mei 2025 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Provinsi Banten sebesar 1,57 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 107,71. Tertinggi di Kabupaten Pandeglang sebesar 2,20 persen dengan IHK sebesar 108,19. Inflasi y-on-y terjadi karena naiknya harga pada semua kelompok pengeluaran yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,30 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,29 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,58 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,84 persen; kelompok kesehatan sebesar 1,02 persen; kelompok transportasi sebesar 0,69 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,56 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 4,21 persen; kelompok pendidikan sebesar 1,25 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,95 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 7,81 persen. Tingkat deflasi month to month (m-to-m) Provinsi Banten bulan Mei 2025 sebesar 0,54 persen dan tingkat inflasi year to date (y-to-d) sebesar 1,03 persen.

Pada Juni 2025 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Provinsi Banten sebesar 1,83 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 107,91. Tertinggi di Kabupaten Pandeglang sebesar 2,79 persen dengan IHK sebesar 108,25. Inflasi y-on-y terjadi karena naiknya harga pada semua kelompok pengeluaran yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 2,30 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,29 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,69 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,60 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,38 persen; kelompok transportasi sebesar 0,72 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,51 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 3,22 persen; kelompok pendidikan sebesar 1,24 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,06 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 7,40 persen.

Tingkat inflasi month to month (m-to-m) Provinsi Banten bulan Juni 2025 sebesar 0,19 persen dan tingkat inflasi year to date (y-to-d) sebesar 1,22 persen.

Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Provinsi Banten melakukan langkah-langkah konkrit pengendalian inflasi daerah sebagai berikut :

- Gerakan Pasar Murah di seluruh kab /kota di Provinsi Banten yang dilaksanakan pada 1-30 Juni sebanyak 19 kali.
- Gerakan Pasar Murah di seluruh kab /kota di Provinsi Banten yang dilaksanakan pada 1-30 Mei sebanyak 21 kali
- Gerakan Pasar Murah di seluruh kab /kota di Provinsi Banten yang dilaksanakan pada 1-30 April sebanyak 11 kali
- Taman Jagung bersama Gubernur banten dalam program kanan kiri jlan tol tanam jagung kabupaten serang 5 Juni 2025
- Tindaklanjut rapat koordinasi tim pengendalian inflasi daerah setiap minggu di selama triwulan II
- Kerjasama antar Daerah dan Penandatanganan KAD BUMD Kab/Kota dan Provinsi Banten 17 Juni 2025
- Kerjasama antar daerah PT. Agrobisnis Banten Mandiri dengan perumda pasar jaya dan perumda dharma jaya DKI Jakarta 17 Juni 2025
- Peninjauan Lokasi Pembangunan jalan usaha tani dikabupaten lebak oleh Gubernur Banten pada tanggal 26 Mei 2025.
- Koordinasi Bank Indonesia Banten dengan BUMD pangan PT. Agrobisnis Banten Mandiri terkait penguatan BUMD pangan dalam pengendalian inflasi pangan
- Panen raya padi serentak di 14 Provinsi simbolis dilaksanakan dikecamatan kramatwatu Bersama Gubernur Banten 7 April 2025

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Provinsi Banten melakukan langkah-langkah konkrit pengendalian inflasi daerah sebagai berikut :

- Gerakan Pasar Murah di seluruh kab /kota di Provinsi Banten yang dilaksanakan pada 1-30 Juni sebanyak 19 kali.
- Gerakan Pasar Murah di seluruh kab /kota di Provinsi Banten yang dilaksanakan pada 1-30 Mei sebanyak 21 kali
- Gerakan Pasar Murah di seluruh kab /kota di Provinsi Banten yang dilaksanakan pada 1-30 April sebanyak 11 kali
- Taman Jagung bersama Gubernur banten dalam program kanan kiri jlan tol tanam jagung kabupaten serang 5 Juni 2025
- Tindaklanjut rapat koordinasi tim pengendalian inflasi daerah setiap minggu di selama triwulan II
- Kerjasama antar Daerah dan Penandatanganan KAD BUMD Kab/Kota dan Provinsi Banten 17 Juni 2025
- Kerjasama antar daerah PT. Agrobisnis Banten Mandiri dengan perumda pasar jaya dan perumda dharma jaya DKI Jakarta 17 Juni 2025
- Peninjauan Lokasi Pembangunan jalan usaha tani dikabupaten lebak oleh Gubernur Banten pada tanggal 26 Mei 2025.
- Koordinasi Bank Indonesia Banten dengan BUMD pangan PT. Agrobisnis Banten Mandiri terkait penguatan BUMD pangan dalam pengendalian inflasi pangan

Panen raya padi serentak di 14 Provinsi simbolis dilaksanakan dikecamatan kramatwatu
Bersama Gubernur Banten 7 April 2025

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Aktif melakukan inspeksi lapangan untuk memantau langsung kondisi harga dan pasokan barang.
2. Stabilitas harga harus dijaga pada seluruh komoditas utama, terutama bahan pangan.
3. Hambatan logistik akibat infrastruktur yang kurang memadai perlu segera diatasi untuk memperlancar distribusi.
4. Program operasi pasar murah harus terus ditingkatkan guna membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.
5. Sektor pertanian perlu dipantau secara intensif, termasuk memastikan ketersediaan dan distribusi subsidi benih tepat sasaran
6. Konektivitas antar daerah harus diperkuat untuk mengurangi ketergantungan pada impor dan memastikan kelancaran pasokan domestik.
7. Efisiensi dalam belanja daerah harus dioptimalkan dengan memprioritaskan program-program strategis yang mendukung pengendalian inflasi.
8. Edukasi dan pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam pengelolaan keuangan, perlu digalakkan untuk meningkatkan daya beli dan stabilitas ekonomi.
9. Kolaborasi antar anggota TPID harus ditingkatkan untuk memastikan langkah-langkah pengendalian inflasi lebih terkoordinasi dan efektif
10. Mengidentifikasi beberapa wilayah untuk dijadikan farming industri yang dikelola secara bersama. Dengan ini dapat menolong setiap stakeholder. Meringankan dan mendorong lapangan pekerjaan.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Perlu dilakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian untuk meningkatkan hasil produksi, khususnya komoditas strategis seperti padi, jagung, dan hortikultura.
2. Dorong percepatan realisasi tanam di kabupaten/kota melalui pendampingan, bantuan benih, dan penyuluhan terpadu
3. Dinas PUPR perlu menyelaraskan pembangunan saluran irigasi dengan data lokasi cetak sawah, guna mendukung keberlanjutan produksi pangan.
4. Pemanfaatan teknologi **Smart Farming/Digital Farming** untuk meningkatkan efisiensi pertanian modern
5. Tingkatkan alokasi dan optimalisasi **dukungan APBD** pada program-program strategis pengendalian inflasi pangan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
6. Dorong kerjasama antar daerah (KAD) untuk menjaga kelancaran distribusi komoditas pangan dari daerah surplus ke daerah defisit.
7. Mendorong percepatan distribusi pupuk bersubsidi dan alat pertanian agar produksi tidak terhambat